



**UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEBIJAKAN PERTAHANAN NIRMILITER DALAM  
MENGHADAPI ANCAMAN NONMILITER DI WILAYAH  
PERBATASAN DARAT KALIMANTAN BARAT-MALAYSIA**

**SAHRUN GULTOM**

**220180101019**

Disertasi untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
dalam Mendapatkan Gelar Doktor

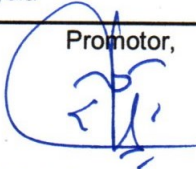
**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL  
PROGRAM STUDI DOKTORAL ILMU PERTAHANAN**

**BOGOR  
DESEMBER 2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI

Nama : Sahrun Gultom  
NIM : 220180101019  
Program Studi : Doktoral Ilmu Pertahanan  
Fakultas : Keamanan Nasional  
Judul Disertasi : Kebijakan Pertahanan Nirmiliter dalam Menghadapi  
Ancaman Nonmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan  
Barat-Malaysia

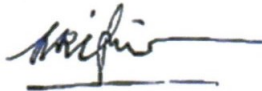
Promotor,



Prof. Dr. Irdam Ahmad, M.Stat.

Tanggal:

Co-Promotor I,



Prof. Dr. Anwar Arifin  
Guru Besar Fakultas  
Ilmu Komunikasi YAI  
Tanggal:

Co-Promotor II,



Dr. Edi Suhardono, S.E., M.A.P., CIQnR  
Laksamana Pertama TNI (Purn)

Tanggal:


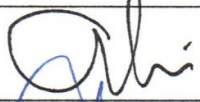
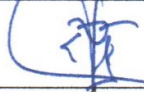
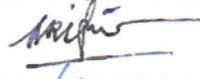


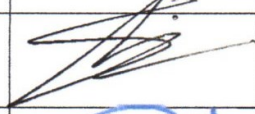


Mengetahui,  
Plh. Direktur Program Studi Doktoral/S3,



Dr. Joni Widjayanto, S.Sos, M.M., CIQnR, CIQaR, CIPA  
Mayor Jenderal TNI

Tanggal:

## LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

Nama : Sahrun Gultom NIM : 220180101019 Program Studi : Doktor Ilmu Pertahanan Fakultas : Keamanan Nasional Judul Disertasi : Kebijakan Pertahanan Nirmiliter dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat-Malaysia			
No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Ketua Sidang: Mayjen TNI Dr. Joni Widjayanto, S.Sos, M.M., CIQnR., CIQaR, CIPA.		
2.	Sekretaris / Penguji Internal I: Brigjen TNI Dr. Yusuf Ali, S.E., M.M., CIQaR.		
3.	Promotor: Prof. Dr. Irdam Ahmad, M.Stat.		
4.	Co-Promotor I: Prof. Dr. Anwar Arifin		
5.	Co-Promotor II: Laksma TNI (Purn) Dr. Edi Suhardono, S.E., M.A.P, CIQnR		
6.	Penguji Internal II: Brigjen TNI Dr. Pujo Widodo, S.E., M.A., M.D.S., M.Si., M.Si (Han)		
7.	Penguji Internal III: Brigjen TNI Dr. Drs. Luhut Simbolon, M.Si., CIQnR., CIQaR		
8.	Penguji Eksternal I: Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL.		
9.	Penguji Eksternal II: Dr. Miftahuddin, M.Si		

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam disertasi ini tidak terdapat suatu karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam disertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Jakarta, Desember 2021



Sahrin Gultom

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulisan disertasi dengan judul: “Kebijakan Pertahanan Nirmiliter dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat-Malaysia” dapat diselesaikan. Penyusunan disertasi ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Pertahanan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia.

Penyusunan disertasi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Laksamana Madya TNI Prof. Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR., IPU, selaku Rektor Unhan RI;
2. Mayor Jenderal TNI Dr. Joni Widjayanto, S.Sos, M.M., CIQnR, CIQaR, CIPA selaku Pih. Direktur Program Doktor/S3, Unhan RI sekaligus Ketua Sidang Terbuka;
3. Prof. Dr. Irdam Ahmad, M.Stat. selaku Promotor;
4. Prof. Dr. Anwar Arifin selaku Co-Promotor 1;
5. Laksamana Pertama TNI (Purn) Dr. Edi Suhardono, S.E., M.A.P., CIQnR selaku Co-Promotor 2;
6. Kolonel Cba Dr. Yusuf Ali, S.E., M.M., CIQaR. selaku Sesprodi sekaligus penguji Sidang Tertutup dan Terbuka;
7. Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng selaku penguji Sidang Tertutup;
8. Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL. (Rektor Universitas Islam Riau, Pekanbaru), selaku penguji eksternal Sidang Terbuka;
9. Brigjen TNI Dr. Drs. Luhut Simbolon, M.Si., CIQnR., CIQaR selaku penguji Sidang Tertutup dan Terbuka;

10. Dr. Herlina J.R. Saragih, M.Si., CIQnR., CIQaR selaku penguji Sidang Tertutup;
11. Brigadir Jenderal TNI Dr. Jubei Levianto, S.Sos., M.M. (Dirbelneg, Ditjen Pothan, Kemhan) selaku narasumber;
12. Brigadir Jenderal TNI Dr. Pujo Widodo, S.E., S.H., M.A., M.D.M.S., M.Si., M.Si (Han) selaku narasumber dan penguji Sidang Tertutup dan Terbuka;
13. Laksamana Pertama TNI Dr. Rivai Ras selaku narasumber;
14. Kol Laut Dr. Sugeng Suryanto, S.AP., M.A.P (Kasubdit Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pertahanan Negara, Ditjakstra, Ditjen Strahan, Kemhan) selaku narasumber;
15. Dra. Endang Purwaningsih, M.Si. (Kasubdit Lingdik Ditbelneg, Ditjen Pothan, Kemhan) selaku narasumber;
16. Indah Permata (Kasubag TU Bela Negara Ditbelneg, Ditjen Pothan, Kemhan) selaku narasumber;
17. Viktorius Dunand, SE, M.Si (Kepala Administrator PLBN Entikong) selaku narasumber;
18. Drs. Edy Supriyanta, M.Si (Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP) selaku narasumber;
19. Dr. Miftahuddin, M.Si (Tenaga Ahli Bidang Fasilitasi dan Layanan Pengelolaan PLBN Terpadu pada Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP) selaku narasumber dan penguji eksternal Sidang Tertutup dan Terbuka;
20. Edison Silaen. S.Sos (Staf BNPP) selaku narasumber;
21. Letkol Czi Asril Arifin, S.T. M.Han, Kasubbid Sun Renja Bid Renkon Puskon Baranahan Kemhan selaku narasumber;
22. Lettu Inf Henry (Pasiintel Satgas Pamtas Yonif 642/Kps) selaku narasumber;
23. Lettu Chb Agus (Anggota Puskodalops Kodam XII/Tpr) selaku narasumber;

24. Lettu Chb Agus (Dantonhub Satgas Pamtas Yonif 642/Kps) selaku narasumber;
25. Priskah, S.H., M.H. (Kabid Kerma, Biro Hukum BNPB) selaku narasumber;
26. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Cohort 1 dan staf Prodi Doktoral yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan selama proses perkuliahan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada istri dan anak kami yang telah banyak memberikan dukungan selama proses tugas belajar dari awal hingga penyusunan disertasi ini.

Peneliti menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan disertasi ini. Akhir kata, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bagi pemangku kepentingan terkait dalam upaya membangun pertahanan nirmiliter.

Jakarta, Desember 2021

Sahrin Gultom

## ABSTRAK

Secara umum masalah pokok penelitian ini lahir dari suatu kenyataan bahwa UU No. 3 Tahun 2002 khususnya tentang Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter belum dilaksanakan. Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang berbatasan dengan negara Malaysia yang rawan terjadi ancaman nonmiliter. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis terjadinya ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan darat Kalimantan Barat-Malaysia; (2) Menganalisis kesiapan pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan darat Kalimantan Barat-Malaysia.; dan (3) Menganalisis kebijakan Kemhan untuk mendorong terwujudnya pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan darat Kalimantan Barat-Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data kualitatif dan analisis kebijakan publik. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa faktor penyebab utama terjadinya ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia adalah faktor ekonomi. Ancaman ekonomi akan berakibat kepada munculnya ancaman ideologi, politik, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum dan bahkan legislasi sehingga harus segera diatasi dengan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Tidak bisa dipungkiri bahwa K/L belum siap menghadapi ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia. Sementara itu kebijakan yang telah dilakukan oleh Kemhan dalam mendorong terwujudnya pertahanan nirmiliter di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia belum maksimal karena kebijakan tersebut belum tersinergi dengan kebijakan K/L di luar bidang pertahanan terutama dalam hal sosialisasi peraturan perundang-undangan. Di samping itu, penelitian juga menghasilkan model pertahanan nirmiliter yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Kemhan, K/L dan Pemda dalam perumusan kebijakan pertahanan nirmiliter sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kata kunci: Ancaman nonmiliter, Kalimantan Barat, Kebijakan Pertahanan, Perbatasan, Pertahanan nirmiliter.

## ABSTRACT

*In general, the main problem of this research arises from the fact that Law No. 3 of 2002, especially regarding the National Defense System in facing non-military threats, has not been implemented. West Kalimantan Province is one of Indonesian territories bordering Malaysia, which is prone to non-military threats. This study aims to: (1) analyze the occurrence of non-military threats in the West Kalimantan-Malaysia land border area; (2) Analyzing the readiness of non-military defense in facing non-military threats in the West Kalimantan-Malaysia land border area; and (3) Analyzing the Ministry of Defense's policies to encourage the realization of non-military defense in the face of non-military threats in the West Kalimantan-Malaysia land border area. This research uses qualitative methods with qualitative data analysis and public policy analysis. Dari the research results, it can be concluded that the main factor causing the occurrence of non-military threats in the land border area of West Kalimantan-Malaysia is the economic factor. The economic threat will result in the emergence of ideological, political, socio-cultural, technological, public safety and even legislation threats so that it must be immediately addressed with economic development to improve the welfare of the people in border areas. It cannot be denied that Ministries/Agencies are not ready to face non-military threats in the Kalbar-Malaysia land border area. Meanwhile, the policies that have been carried out by the Ministry of Defense in encouraging the realization of non-military defense in the Kalbar-Malaysia land border area have not been maximized because these policies have not been synergized with Ministries/Agencies policies outside the defense sector, especially in terms of disseminating statutory regulations. In addition, the research also produces a non-military defense model that can be used as input for the Ministry of Defense, Ministries/Agencies and Local Governments in the formulation of non-military defense policies according to their respective duties and functions.*

*Keywords: Border, Defense Policy, Non-military Defense, Non-military threats, West Kalimantan*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GRAFIK.....	xx
DAFTAR BAGAN .....	xxi
DAFTAR SINGKATAN .....	xxii
DAFTAR PENGERTIAN.....	xxx
DAFTAR NOMENKELATUR .....	xxxii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus dan Subfokus .....	9
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	10
1.5 Manfaat Penelitian .....	10
1.5.1 Manfaat Teoritis .....	10
1.5.2 Manfaat Praktis.....	10

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Ancaman .....	12
2.1.1.1 Kompleksitas Ancaman .....	14
2.1.1.2 Dimensi Ancaman Nonmiliter .....	16
2.1.2 Pertahanan .....	22
2.1.2.1 Ilmu Pertahanan .....	25
2.1.2.2 Sistem Pertahanan Rakyat Semesta .....	26
2.1.2.3 Sistem Pertahanan Nirmiliter .....	27
2.1.3 Keamanan Nasional .....	28
2.1.4 Kebijakan.....	29
2.1.3.1 Kebijakan Publik.....	31
2.1.3.2 Kebijakan Pertahanan .....	32
2.1.5 Hubungan Sipil-Militer.....	33
2.1.6 Kesiapan.....	35
2.1.7 Perbatasan .....	36
2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	39
2.3 Kerangka Pemikiran .....	47
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN .....	50
3.1 Metode dan Desain Penelitian .....	50
3.1.1 Metode Penelitian Kualitatif .....	50
3.1.2 Desain Penelitian.....	51
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	52
3.2.1 Tempat Penelitian.....	52
3.2.2 Waktu Penelitian.....	54

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian .....	54
3.3.1 Subyek Penelitian .....	54
3.3.2 Obyek Penelitian.....	54
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.4.1 Studi Dokumen .....	55
3.4.2 Wawancara.....	55
3.4.3 <i>Focus Group Discussion</i> (FGD).....	56
3.5 Teknik Pengolahan Data.....	56
3.5.1 Reduksi Data .....	56
3.5.2 Triangulasi .....	57
3.6 Teknik Analisis Data .....	58
3.6.1 Analisis Data Kualitatif ( <i>Qualitative Data Analysis</i> ).....	58
3.6.2 Analisis Kebijakan Publik .....	60
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	63
4.1 Gambaran Umum Obyek dan Subyek Penelitian .....	63
4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	63
4.1.1.1 Kondisi Wilayah Kalimantan Barat.....	63
4.1.1.2 Batas Wilayah Kalimantan Barat - Malaysia .....	67
4.1.1.3 K/L yang Bertugas di Wilayah Perbatasan Darat Kalbar- Malaysia.....	69
4.1.1.4 Pasukan Pengaman Perbatasan .....	71
4.1.2 Gambaran Umum Subyek Penelitian .....	72
4.2 Hasil Pengumpulan Data .....	75
4.2.1 Hasil Pengumpulan Data Studi Dokumen .....	75
4.2.1.1 Kondisi Patok Batas di Entikong .....	78
4.2.1.2 Tuntutan Masyarakat Perbatasan.....	79

4.2.1.3 Ancaman Ideologi dan Politik .....	80
4.2.1.4 Ekonomi .....	81
4.2.1.5 Narkoba.....	82
4.2.1.6 Penyelundupan dan <i>Human Trafficking</i> .....	83
4.2.1.7 Sosialisasi Pertahanan Nirmiliter .....	84
4.2.1.8 Kondisi Pelintas Batas Pada 7 PLBN .....	85
4.2.1.9 BNPP di Kalbar .....	89
4.2.1.10 Jakumhaneg Tahun 2020-2024 .....	90
4.2.1.11 Berbagai Pendapat Ahli Mengenai Ancaman Nonmiliter .....	96
4.2.2 Hasil Pengumpulan Data Wawancara.....	100
4.3 Hasil Pengumpulan Data melalui <i>Group Discussion</i> .....	183
4.3.1 FGD 1.....	184
4.3.2 SGD.....	185
4.3.3 FGD 2.....	186
4.3.4 RTD .....	188
4.4 Hasil Pengolahan Data .....	191
4.4.1 Hasil Pengolahan Data Ancaman Nonmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat.....	191
4.4.1.1 Kondisi Sosial Masyarakat.....	191
4.4.1.2 Kondisi Titik-Titik Perlintasan di Perbatasan Kalbar-Malaysia.....	194
4.4.1.3 Kondisi Patok Perbatasan .....	197
4.4.2 Hasil Pengolahan Data Kesiapan Pertahanan Nirmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat-Malaysia .....	199
4.4.2.1 <i>Customs</i> (Bea Cukai) .....	207
4.4.2.2 <i>Immigration</i> (Imigrasi).....	208

4.4.2.3 <i>Quarantine</i> (Karantina) .....	209
4.4.2.4 <i>Security</i> (Keamanan).....	212
4.4.2.5 BNPP .....	214
4.4.3 Hasil Pengolahan Data Kebijakan Kemhan untuk Mendorong Terwujudnya Pertahanan Nirmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat-Malaysia .....	220
4.4.4 Hasil Pengolahan Data Kebijakan K/L .....	222
4.5 Hasil Analisis Data .....	224
4.5.1 Analisis Ancaman Nonmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat .....	224
4.5.2 Analisis Kesiapan Pertahanan Nirmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat-Malaysia .....	227
4.5.3 Analisis Kebijakan Kemhan untuk Mendorong Terwujudnya Pertahanan Nirmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat-Malaysia.....	229
4.6 Interpretasi Data .....	251
4.6.1 Interpretasi Data Ancaman Nonmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat.....	251
4.6.2 Interpretasi Data Kesiapan Pertahanan Nirmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat-Malaysia .....	255
4.6.3 Interpretasi Data Kebijakan Kemhan untuk Mendorong Terwujudnya Pertahanan Nirmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat-Malaysia .....	256
4.6.3.1 OMSP dan Pertahanan Nirmiliter.....	261
4.6.3.2 Dewan Pertahanan Nasional .....	262
4.7 Pembahasan .....	265

4.7.1 Pembahasan Ancaman Nonmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat .....	265
4.7.2 Pembahasan Kesiapan Pertahanan Nirmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat-Malaysia .....	274
4.7.2.1 Berbagai Perspektif mengenai Ancaman di Perbatasan Kalbar-Malaysia .....	276
4.7.2.2 Postur Pertahanan Nirmiliter.....	281
4.7.3 Pembahasan Kebijakan Kemhan untuk Mendorong Terwujudnya Pertahanan Nirmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat-Malaysia.....	287
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>292</b>
5.1 Kesimpulan.....	292
5.2 Rekomendasi.....	294
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>297</b>
Peraturan Perundangan .....	297
Publikasi Pemerintah.....	298
Buku.....	299
Jurnal .....	302
Penelitian .....	304
Website .....	304
Lain-lain .....	309
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.....	311
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara.....	314
Daftar Narasumber.....	314
Narasumber 1 .....	315
Narasumber 2 .....	321

Narasumber 3 .....	327
Narasumber 4 .....	328
Narasumber 5 .....	334
Narasumber 6 .....	336
Narasumber 7 .....	341
Narasumber 8 .....	343
Narasumber 9 .....	353
Narasumber 10 .....	361
Narasumber 11 .....	363
Narasumber 12 .....	365
Lampiran 3 : Surat Perintah Penetapan Promotor dan Copromotor .....	370
Lampiran 4 : Dokumentasi <i>Group Discussion</i> .....	373
A. FGD 1 .....	373
B. RTD .....	374
Lampiran 5 : Jaringan Komunikasi Radio PAMTAS RI-MALAYSIA .....	375
Lampiran 6 : Tabel Patok Batas .....	379
Lampiran 7 : Rekapitulasi Hasil Operasi Pamtas RI – Malaysia.....	409
Rekap TA. 2018 .....	409
Rekap TA. 2019 .....	413
Rekap TA. 2020 .....	417
Lampiran 8 : Dokumentasi Pamtas .....	420
Lampiran 9 : Pembukaan Lahan JIPP .....	426

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 IPM Indonesia Menurut Provinsi dan Status Pembangunan Manusia pada Tahun 2019.....	39
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	48
Gambar 3.1 Peta Perbatasan Darat Kalbar – Malaysia.....	53
Gambar 4.1 Dislokasi Pasukan Pamtas Kalbar-Malaysia .....	72
Gambar 4.2 Aksi Damai Masyarakat Dayak di Entikong .....	79
Gambar 4.3 Latihan Perang yang Melibatkan Askar Wathaniyah .....	81
Gambar 4.4 Gubernur Kalbar Cornelis dalam Kegiatan Sosialisasi Pertahanan Nirmiliter, 11 Agustus 2016.....	84
Gambar 4.5 Pokok Jakumhaneg Pertahanan Nirmiliter .....	95
Gambar 4.6 Kondisi Kerawanan Wilayah Perbatasan.....	190
Gambar 4.7 Titik Perlintasan Non PLB dan Non PLBN di Kalbar .....	195
Gambar 4.8 Rincian Tipe & Jumlah Pilar Batas RI-Malaysia.....	198
Gambar 4.9 Penemuan Miras oleh Patroli Pamtas .....	208
Gambar 4.10 Satgas Pamtas Bersama Karantina Pertanian Musnahkan Barang Ilegal Asal Malaysia .....	210
Gambar 4.11 Pelaksanaan Rapid Test di PLBN .....	211
Gambar 4.12 Pemeriksaan Suhu Tubuh di Jalur Tikus .....	212
Gambar 4.13 Dokumentasi Patroli Polri di Perbatasan Kalbar .....	213
Gambar 4.14 Tugas BNPP .....	214
Gambar 4.15 Outstanding Boundary Problems.....	217
Gambar 4.16 Aplikasi MaxQDA untuk Menganalisis Ancaman Nonmiliter .....	225
Gambar 4.17 Hasil Pemetaan Aplikasi MaxQDA untuk Menganalisis Ancaman Nonmiliter dan Pertahanan Nirmiliter .....	225
Gambar 4.18 Aplikasi MaxQDA untuk Menganalisis Kesiapan Pertahanan Nirmiliter di Kalbar .....	228
Gambar 4.19 Kemhan Melaksanakan Pembangunan JIPP Kalbar .....	233

Gambar 4.20 Peta Realisasi Pembangunan JIPP Kalbar Tahun 2019..	235
Gambar 4.21 Contoh Jalur Perkerasan JIPP .....	237
Gambar 4.22 Tipikal Potongan Melintang Jalur Perintis.....	239
Gambar 4.23 Tipikal Potongan Melintang Jalur Perkerasan .....	240
Gambar 4.24 Jaringan Komunikasi PAMTAS .....	241
Gambar 4.25 Tower Alkom .....	242
Gambar 4.26 Ancaman dan Aktor Pertahanan Negara.....	251
Gambar 4.27 Sistem Pertahanan Negara .....	254
Gambar 4.28 Dokumentasi Pelaku Penyelundupan Narkoba .....	270
Gambar 4.29 Pasar Tradisional .....	271
Gambar 4.30 Satgas Pamtas TNI menemukan <i>Illegal Logging</i> .....	272
Gambar 4.31 OMSP dan Ancaman Nonmiliter.....	277
Gambar 4.32 Model Ancaman Nonmiliter & Pertahanan Nirmiliter di Perbatasan Kalbar-Malaysia.....	278
Gambar 4.33 Kategorisasi Ancaman Nonmiliter di Wilayah Perbatasan Kalbar-Malaysia.....	280

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ciri Ilmu dan Ilmu Pertahanan.....	25
Tabel 2.2 Rangkuman Penelitian Terdahulu .....	45
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	54
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Provinsi Kalbar Tahun 2019.....	66
Tabel 4.2 Daftar Informan dan Waktu Pelaksanaan Wawancara .....	73
Tabel 4.3 Data Studi Dokumen .....	75
Tabel 4.4 Identifikasi Ancaman terhadap Keamanan Nasional .....	96
Tabel 4.5 Berbagai Pendapat Mengenai Ancaman dan Aktor.....	96
Tabel 4.6 Pendapat Ahli terkait Ancaman Nonmiliter .....	97
Tabel 4.7 Wawancara dengan Informan dari BNPP dan BNPB .....	101
Tabel 4.8 Wawancara dengan Personil TNI di Perbatasan Kalbar.....	142
Tabel 4.9 Wawancara dengan Informan dari Kemhan .....	165
Tabel 4.10 Hasil Pengumpulan Data Group Discussion.....	183
Tabel 4.11 Hasil Ops Satgas Pamtas Yonif 642/Kps Januari 2021 .....	196
Tabel 4.12 Data Patroli Patok Perbatasan Kalbar .....	197
Tabel 4.13 Dimensi Ancaman Nonmiliter .....	199
Tabel 4.14 Kebijakan Kemhan Terkait Pertahanan Nirmiliter .....	220
Tabel 4.15 Intisari UU Nomor 43 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2011 .....	222
Tabel 4.16 Realisasi Pembangunan JIPP Kalbar pada Tahun 2019 .....	234
Tabel 4.17 Tabel Capaian Pembangunan JIPP .....	235
Tabel 4.18 Pasal Dalam UU No.3 Tahun 2002 terkait Ancaman Nonmiliter .....	252
Tabel 4.19 Dimensi Ancaman dan K/L yang Menjadi Unsur Utama .....	255
Tabel 4.20 Data pelintas batas pada 7 PLBN .....	267
Tabel 4.21 Matriks Ancaman dan K/L yang Berwenang.....	269
Tabel 4.22 Tabel Dimensi Kemampuan K/L guna Menghadapi Ancaman Nonmiliter.....	285

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Data Pelintas Batas Melalui PLBN Tahun 2020 .....	85
Grafik 4.2 Data Pelintas Batas Melalui PLBN Aruk Tahun 2020.....	86
Grafik 4.3 Data Pelintas Batas Melalui PLBN Entikong Tahun 2020 .....	86
Grafik 4.4 Data Pelintas Batas Melalui PLBN Badau Tahun 2020.....	87
Grafik 4.5 Data Pelintas Batas Melalui PLBN Motaain Tahun 2020 .....	87
Grafik 4.6 Data Pelintas Batas Melalui PLBN Motamasin Tahun 2020....	88
Grafik 4.7 Data Pelintas Batas Melalui PLBN Wini Tahun 2020 .....	88
Grafik 4.8 Data Pelintas Batas Melalui PLBN Skouw Tahun 2020 .....	89

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Berbagai Bentuk Ancaman terhadap Ketahanan Nasional ....	15
Bagan 2.2 Implementasi Kebijakan Publik sebagai Proses Politis dan Administratif.....	32
Bagan 2.3 Kesiapan dan Waktu Peringatan .....	36
Bagan 3.1 Alur Desain Penelitian .....	52
Bagan 3.2 Proses Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif .....	58
Bagan 3.3 Elemen dalam Pendekatan Analisis Kebijakan .....	61
Bagan 3.4 Langkah-langkah dalam Sebuah Studi Analisis Kebijakan....	62
Bagan 4.1 Struktur Organisasi BNPP .....	71
Bagan 4.2 Instansi Subyek Penelitian.....	73
Bagan 4.3 Ancaman ke Depan .....	99
Bagan 4.4 Struktur Instansi dan Informan.....	100
Bagan 4.5 Dimensi Pengelolaan Perbatasan Negara .....	219
Bagan 4.6 7 PLBN yang ada di Indonesia .....	226
Bagan 4.7 Skema Jakumhaneg (Nirmiliter) 2020-2024.....	259
Bagan 4.8 Rancangan Struktur Organisasi DPN .....	264
Bagan 4.9 Konsep Pertahanan Nirmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalbar - Malaysia.....	275
Bagan 4.10 Postur Pertahanan Nirmiliter .....	282
Bagan 4.11 Pengelolaan Sumdanas untuk Haneg.....	284
Bagan L - 1 Jaringan Komunikasi PAMTAS.....	375
Bagan L - 2 Jaringan Komunikasi Sektor Kodam XII/TPR .....	376
Bagan L - 3 Jaringan Komunikasi Perbatasan Berbasis IP .....	376

## DAFTAR SINGKATAN

3-D

*Defense, Diplomacy, Development*

alkom

alat komunikasi

ATHG

ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan

AD

Angkatan Darat

AS

Amerika Serikat

Bakosurtanal

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

BI

Bank Indonesia

BIN

Badan Intelijen Negara

BNN

Badan Narkotika Nasional

BNPB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BNPP

Badan Nasional Pengelola Perbatasan

BNPT

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

BPIP

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

BPP

Badan Pengelola Perbatasan

BPS

Badan Pusat Statistik

BUMN

Badan Usaha Milik Negara

CBRN-E

*Chemical, Biology, Radiation, Nuclear, and Explosives*

Covid-19

Corona Virus Disease 2019

DPD

Dewan perwakilan Daerah

DPN

Dewan Pertahanan Nasional.

DPR

Dewan Perwakilan Rakyat

Dukgarhaneg

Dukungan Penyelenggaraan Pertahanan Negara

FGD

*Focus Group Discussion*

HAM

Hak Asasi Manusia

Haneg

Pertahanan Negara

Ha

Hektare

IPM

Indeks Pembangunan Manusia

IMF

International Monetary Fund

ipoleksosbudkumtekhamkam

ideologi, politik, sosial budaya, hukum, teknologi, dan pertahanan keamanan

Iptek

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Jakumhaneg

Kebijakan Umum Pertahanan Negara

Jatim

Jawa Timur

JIPP

Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan

K/L

Kementerian/Lembaga

Kalbagbar

Kalimantan Bagian Barat

Kalbar

Kalimantan Barat

Kalsel

Kalimantan Selatan

Kalteng

Kalimantan Tengah

Kaltim

Kalimantan Timur

Kemen PU

Kementerian Pekerjaan Umum

Kemenag

Kementerian Agama

Kemenaker  
Kementerian Ketenagakerjaan

Kemendag  
Kementerian Perdagangan

Kemendikbud  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemenhub  
Kementerian Perhubungan

Kemenhut  
Kementerian Kehutanan

Kemenkes  
Kementerian Kesehatan

Kemenkeu  
Kementerian Keuangan

Kemenko Perekonomian  
Kementerian Koordinator Perekonomian

Kemenkumham  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kemensos  
Kementerian Sosial

Kementan  
Kementerian Pertanian

Kementerian ESDM  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian LHK  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian PPN/Bappenas  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian PUPR  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kemhan  
Kementerian Pertahanan

Kemkominfo  
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kemlu  
Kementerian Luar Negeri

KKP  
Kementerian Kelautan dan Perikanan

km  
kilometer

Kodam  
Komando Daerah Militer

LSM  
Lembaga Swadaya Masyarakat

m  
meter

Mendagri  
Menteri Dalam Negeri

Menko Polhukam  
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

MPR  
Majelis Permusyawaratan Rakyat

NAS  
National Academy of Sciences

NKRI  
Negara Kesatuan Republik Indonesia

No.

Nomor

NRI

Negara Republik Indonesia

NRC

Nasional Research Council

NTT

Nusa Tenggara Timur

OBP

Outstanding Boundary Problem

OGH

organosol, gley, dan humus

OMP

Operasi Militer Perang

OMSP

Operasi Militer Selain Perang

Pemda

Pemerintah Daerah

Pemprov

Pemerintah Provinsi

Perpres

Peraturan Presiden

Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah

Pilpres

Pemilihan Presiden

PLBN

Pos Lintas Batas Negara

PMK

podsolet merah kuning

Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia

PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

PSDN

Pengelolaan Sumber Daya Nasional

QDA

*Qualitative Data Analysis*

RI

Republik Indonesia

SDA

Sumber Daya Alam

SDM

Sumber Daya Manusia

Sishanneg

Sistem Pertahanan Negara

Sishanrata

Sistem Pertahanan Rakyat Semesta

Sumdanas

Sumber Daya Nasional

TNI

Tentara Nasional Indonesia

Tpr

Tanjungpura

USAID

*United States Agency for International Development*

UU

Undang-Undang

UUD

Undang-Undang Dasar

WNA

Warga Negara Asing

WNI

Warga Negara Indonesia

Yonif

Batalyon Infantri.

## DAFTAR PENGERTIAN

### **Ancaman**

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Hanneg pada bagian penjelasan Pasal 4 dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 1 Ayat (22) dijelaskan bahwa ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

### **Kebijakan**

Menurut Walker (2000), "Kebijakan adalah sekumpulan kekuatan dalam kendali para aktor dalam domain kebijakan yang mempengaruhi struktur dan kinerja sistem".

### **Hubungan Sipil-Militer**

Rietjens dan Bollen(2008) menempatkan hubungan sipil militer dalam konteks masa kini yaitu keberadaan realita berupa perang baru (new war) yang tidak hanya mengedepankan senjata, kedaruratan, serta masalah lainnya yang bersifat kompleks dengan dasar pemikiran 3-D (Defense, Diplomacy, Development).

### **Perbatasan**

Hess dan van Wincoop dalam Anderson dan Wincoop (2001) menyatakan bahwa, "Perbatasan nasional menandai perbedaan kelembagaan, kebijakan dan peraturan yang memiliki signifikansi ekonomi. Signifikansi kebijakan ini segera menjadi jelas ketika membandingkan negara dengan kawasan di dalam negara yang tidak dipisahkan oleh batas negara".

### **Pertahanan**

Bowyer (2007) mendefinisikan pertahanan sebagai: (1) suatu aksi untuk menolak serangan; dan dengan pendekatan berbeda dapat bermakna sebagai (2) suatu kekuatan dalam bentuk militer.

## DAFTAR NOMENKELATUR

### **Sishanneg**

Sistem pertahanan negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2002 adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

### **Sishanta**

Sistem Pertahanan Semesta menempatkan TNI sebagai komponen utama pertahanan.